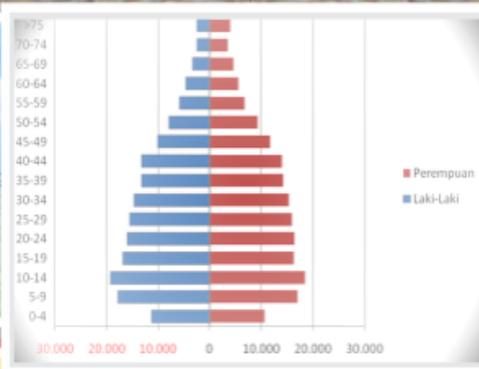




PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan suatu konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variabel, agar tujuan pembangunan tersebut berhasil dan tepat sasaran. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mengedepankan pembangunan berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk, dari, dan oleh penduduk atau penduduk merupakan subyek sekaligus menjadi obyek pembangunan. Penduduk sebagai modal dasar pembangunan dan faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk dengan lingkungannya.

Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (kota, kecamatan, kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurasi dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Seiring dengan kebutuhan data kependudukan tersebut untuk kebutuhan pembangunan diberbagai sektor maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang

menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada Pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya pada Pasal 50 ditegaskan pula pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan, pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah, dan pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

Penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di samping itu penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem administrasi kependudukan (SAK) yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memiliki database kependudukan yang menggunakan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional. Dengan demikian data kependudukan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang meliputi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Database kependudukan yang telah dibangun memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Lembaga lain. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hanya menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Kelemahan data statistik yang disajikan adalah bahwa data tersebut hanya dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (10 tahunan atau 5 tahunan), sehingga untuk memperoleh data tahunan digunakan data proyeksi atau data perkiraan yang dihitung dari dua atau tiga titik tahun pendataan penduduk

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

B. Tujuan

Penyusunan profil perkembangan kependudukan ini bertujuan memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta bahan pengambilan kebijakan lainnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

C. Ruang Lingkup

Penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari database kependudukan melalui Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi nasional bulan Desember 2013 dan disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang memuat antara lain :

1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.
2. Gambaran Umum Daerah yang meliputi letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah.
3. Sumber Data yang meliputi registrasi, non registrasi dan data dari lintas sektoral.
4. Perkembangan kependudukan yang meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk.
5. Kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan kepemilikan akta catatan sipil serta kepemilikan surat keterangan orang terlantar.

Kesimpulan yang menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisa untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

D. Pengertian Umum

Ada beberapa pengertian yang digunakan dan terdapat dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini antara lain :

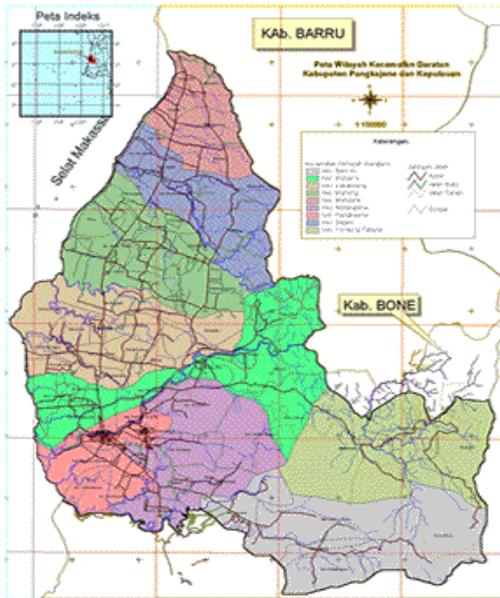
1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kuantitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.

6. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.
7. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.
8. Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
9. Menghitung Angka Kepadatan Penduduk adalah mengetahui tingkat kepadatan suatu daerah yang berguna untuk perencanaan kesinambungan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
10. Menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk adalah mengetahui Tingkat Pertambahan Penduduk suatu daerah dan waktu tertentu.
11. Menghitung Angka Ketergantungan adalah menggambarkan Beban Tanggungan Ekonomi Kelompok Usia Produktif atas Kelompok usia Non Produktif.
12. Menghitung Angka Perkawinan Kasar adalah memberikan gambaran Tingkat Perkawinan Penduduk suatu daerah pada tahun tertentu.
13. Menghitung Angka Perkawinan Umum adalah memberikan gambaran Tingkat Perkawinan pada Usia Kawin.
14. Menghitung Angka Perceraian Kasar adalah memberikan gambaran sosiologis daerah tertentu berkaitan dengan tingkat perceraian.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis Daerah



Gambar 1 Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 1.112,29 km² atau 111.229 Ha, sedangkan luas wilayah yang merupakan penetapan dari dua Kementerian Lembaga Negara yaitu seluas 12.362,29 km² masing-masing : luas darat menurut Permendagri No. 66 tahun 2011 yaitu 898,29 km² dan luas laut 4 mil menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan luas wilayah daerah otonom seluruh Indonesia yaitu 11.464 km².

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis karena dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada koordinat antara 110° sampai 119° Bujur Timur dan 4° 40' sampai 8° 00" Lintang Selatan atau terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dimana 9 kecamatan berada di daratan yang meliputi 2 kecamatan berada di wilayah dataran tinggi (pegunungan) yaitu Kecamatan Balocci dan Tondong Tallasa dan 7 kecamatan berada di wilayah dataran rendah yaitu Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Minasate'ne dan Mandalle, sedangkan 4 kecamatan berada di wilayah kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara. Dengan demikian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai daerah 3 dimensi yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.

B. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bersumber dari database kependudukan SIAK hasil konsolidasi bulan Desember (semester II) tahun 2013 sebesar 357.344 jiwa yang terdiri dari 174.575 laki-laki dan 182.769 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 95,51 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan atau dengan kata lain bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 orang penduduk laki-laki. Jumlah keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 98.238 Kepala Keluarga, dengan demikian anggota keluarga rata-rata 3-4 orang dalam setiap keluarga. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 353.189 jiwa, maka jumlah penduduk tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 4.155 jiwa (1,18%), hal ini disebabkan karena adanya kelahiran dan mutasi atau pindah datang penduduk.

Suku Bugis dan Makassar merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu juga terdapat suku mandar yang menghuni wilayah kepulauan, suku Toraja dan Jawa yang merupakan penduduk pendatang bahkan terdapat suku lainnya namun jumlahnya sedikit yang tersebar di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Keharmonisan kehidupan antar suku di Pangkajene dan Kepulauan terjalin dan terjaga disepanjang waktu sehingga kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan aman dan tertib.

Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun terdapat pula penganut agama lain seperti Kristen dan Katolik. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai

dan hidup saling berdampingan sehingga tidak pernah terjadi kerusuhan atau perkelahian karena isu perbedaan agama.

Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada umumnya menggunakan Bahasa Bugis dan Makassar dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat yang berada di Kecamatan Liukang Tangaya dan Kalmas umumnya menggunakan bahasa mandar dan makassar.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Makro Daerah memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Inflasi), dan rencana ekonomi makro pada tahun perencanaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang diproduksi pada suatu wilayah tertentu (pada tahun tertentu) tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB terdiri atas dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, perubahan yang diukur adalah perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto adalah Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis hasil-hasil pembangunan daerah. Pembangunan perekonomian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama kurun waktu 2008 - 2012, telah mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut diperlihatkan dari hasil penghitungan dan penyusunan PDRB daerah. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, pada tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku telah mencapai Rp. 7.676,52 milyar sedangkan Tahun 2008 hanya mencapai Rp. 3.826,20 milyar, sehingga terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008-2012
(Milyar Rupiah)

(Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan (%)
2008	3.826,20	2.237,50	7,16
2009	4.597,93	2.369,77	5,91
2010	5.379,30	2.519,98	6,34
2011	6.413,12	2.751,34	9,18
2012	7.676,58	3.015,46	9,61

Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013.

Lapangan usaha merupakan salah satu indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa disuatu wilayah. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran mengenai peran masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah di daerah tersebut. Angka-angka PDRB disajikan dalam tabel menurut lapangan usaha masing-masing atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008-2012 (%)

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	6,17	8,29	4,87	5,87	2,36
2	Pertambangan & Penggalian	7,96	12,10	0,11	9,91	2,40
3	Industri pengolahan	6,86	3,78	7,20	10,84	12,35
4	Listrik, Gas dan air bersih	8,70	1,88	4,85	5,86	6,78
5	Bangunan	16,76	6,68	7,21	9,58	20,70
6	Perdagangan, restoran & hotel	9,51	9,32	7,70	7,96	10,77
7	Angkutan dan Komunikasi	3,80	6,61	7,63	11,95	9,14
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14,13	9,90	12,61	8,87	14,60
9	Jasa-Jasa	5,21	8,22	4,27	3,56	3,32
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,16	5,91	6,34	9,18	9,61

Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013.

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 0,43 dari tahun 2009 sebesar 5,91

persen menjadi tahun 2010 sebesar 6,34 persen, 2011 sebesar 9,18 persen dan terakhir 2012 sebesar 9,61 persen.

PDRB atas dasar harga konstan merupakan gambaran aktifitas ekonomi riil yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai 9 sektor lapangan usaha. PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum mengalami peningkatan pada semua sektor dari tahun 2011 ke tahun 2012. PDRB Pada tahun 2012 sektor yang mendominasi adalah sektor bangunan yaitu 20,70 persen disusul sektor Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 14,60 persen. Kemudian sektor Industri, Gas dan air bersih sebesar 12,35 persen selanjutnya sektor Perdagangan, restoran dan hotel dengan nilai 10,77 persen.

Pendapatan Perkapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB Perkapita merupakan tolok ukur kemakmuran penduduk suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan dengan indikator sebesar Rp. 24.635,696,- pada tahun 2012 (Harga Konstan).

Tabel 3. Angka Perkapita PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 (Rp)

Tahun	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
2008	12.776.755,10	10.825.425,00
2009	15.393.106,00	12.567.363,67
2010	17.594.543,00	14.620.563,45
2011	20.766.938,00	16.861.178,51
2012	24.635.696,00	19.376.961,38

Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013.

Tabel 3 menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 PDRB perkapita baru mencapai Rp. 12.776.755,1 sedang tahun 2012 menjadi Rp. 24.635,696,- (harga berlaku), sehingga mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Melalui pertimbangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang tergolong baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 tetap mampu membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Meskipun dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetap diperhadapkan pada tantangan yang sangat besar. Walaupun kenyataannya terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yaitu 9,61 % atau berada diatas pertumbuhan nasional yaitu 6,23 %, dengan urutan kedua terbesar PDRB Se-Sulawesi Selatan. Perbaikan ekonomi tersebut tercermin dari peningkatan PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp. 7.676,52 milyar sedangkan Tahun 2008 hanya mencapai Rp. 3.826,20 milyar, atau terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Adanya perbaikan kondisi ekonomi tersebut yang ditunjang oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi serta dunia usaha yang semakin baik maka diharapkan menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang setiap tahun menunjukkan penurunan, dimana data tahun 2011 telah menurun menjadi 17,36 % dari 19 % ditahun sebelumnya.

D. Potensi Daerah

Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai daerah Tiga Dimensi karena memiliki Struktur Wilayah Laut/Kepulauan yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara, Dataran Rendah yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Minasate'ne dan Mandalle dan Pegunungan yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Balocci dan Tondong Tallasa. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga dikenal sebagai penghasil bandeng memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sangat potensial. Berikut beberapa ulasan singkat tentang potensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan :

1. Potensi Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Laut

Sumber Daya Laut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tersebar di 4 wilayah kecamatan Kepulauan tidak di ragukan lagi, dengan luas laut yang berbatasan langsung dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara dan Kalimantan, maka bisa di simpulkan bahwa sumber daya laut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak di ragukan lagi. Terumbu karang dan aneka Flora dan Fauna Laut yang di miliki oleh kabupaten kepulauan ini memiliki potensi besar baik berupa hasil laut ataupun tempat pariwisata.

Hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Adapun jenis ikan di perairan Pangkep adalah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kerapu, lencam, cucut, pari, layang, selar, kuwe, tetengkek, tenggiri, belanak, teripang, tembang, lamuru, kembung, gulama, cakalang, rajungan, udang putih, cumi-cumi, bawal putih, senanging, udang (dogol, windu, kipas), japuh, terubuk, tuna, teri, dan lain-lain. Kegiatan budidaya

rumpun laut juga telah dikembangkan di beberapa pulau dan hasilnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

b. Sumber Daya Dataran Rendah

Dataran rendah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki potensi yang luar biasa baik di sektor perikanan dan pertanian. Salah satu yang terkenal adalah ikan bandeng yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan penghasil ikan bandeng dari Kabupaten lain. Dengan potensi tambak ribuan hektar yang tersebar di 7 Kecamatan Daratan.

Sumber alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sangat berlimpah ruah. Selain di wilayah kepulauan terdapat potensi perikanan dan pariwisata, juga di wilayah daratan dan pegunungan terhampar potensi pertanian yang menjadi andalan utama masyarakat, misalnya padi, kacang-kacangan dan jeruk bali yang kini sudah banyak merambah pasar domestik. Bahkan khusus untuk jeruk Bali, setiap musim panen pada bulan Juni-Oktober, puluhan kendaraan berat berisi kontainer (peti kemas) hilir mudik memuat jeruk untuk dipasarkan di berbagai kota di Sulawesi Selatan dan di kota-kota besar lainnya seperti Bali, Surabaya hingga Jakarta. Luas lahan untuk jeruk Bali (besar) di Pangkajene dan Kepulauan mencapai 50.787 ha dengan produksi 4.240,1 ton per tahunnya. Jeruk ini banyak tersebar di delapan kecamatan, Pangkajene, Bungoro, Minasa Tene, Labakkang, Marang, Segeri, Mandalle dan Tondong Tallasa. Selain jeruk juga terdapat potensi buah-buahan diantaranya :

- Padi sawah luas panen mencapai 18.248 ha dengan produksi 102.116 ton
- Jagung luas panen 104 ha dengan produksi 328 ton
- Kacang tanah dengan luas panen 1.016 ha dengan produksi 1.773 ton
- Kacang hijau dengan luas panen 1.021 ha produksi 1.011 ton
- Mangga dengan luas panen 52.026 ha produksi 1.607,6 ton
- Pembangunan pertanian juga didukung dengan adanya saluran dan irigasi yang tersebar di beberapa sentra pertanian, seperti irigasi tabo-tabo.

Sedangkan komoditi perkebunan khususnya kelapa menggunakan areal seluas 4.758 Ha dengan produksi 4.731 Ton, Jambu Mete seluas 8.354 Ha dengan produksi 4.113 Ton, Kemiri seluas 825 Ha dengan produksi 362 Ton, Kopi seluas 633 Ha dengan produksi 83 Ton, Kapok seluas 135 Ha dengan produksi 70 Ton dan Kakao 230 Ha dengan Produksi 24 Ton. Komoditi yang memiliki peluang untuk dikembangkan :

- Padi menjadi tepung beras
- Jambu mente yaitu daging buah menjadi Abon dan Anggur, kulit

- Biji menjadi minyak pelumas
- Mangga yaitu buah menjadi sari Buah dan buah kaleng
- Kemiri menjadi minyak kemiri dan rempah rempah

c. Sumber Daya Dataran Tinggi (Pegunungan)

Dataran Tinggi atau pegunungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan 3 kabupaten di Sulawesi Selatan ini yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Maros dan Kabupaten Barru. Terdiri atas pegunungan batu dan bukit tanah. Dengan tingkat kesuburan yang luar biasa. Untuk pegunungan batu saat ini telah di kelola oleh Perusahaan Semen Terbesar di Indonesia Timur yaitu PT. Semen Tonasa dan oleh 32 Perusahaan Batu Marmer (Marble Stone) yang di ekspor ke negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea dan sebagainya. Bahkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri telah di nobatkan sebagai Kabupaten Penghasil Marmer terbesar di Asia bahkan di dunia yang di susul oleh Brasil. Beberapa potensi lain yang seperti silika, batu bara, batu kapur dan lainnya namun potensi tersebut belum.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk sumber daya manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berpenduduk \pm 357.344 jiwa dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai SMA/ sederajat dan perguruan tinggi. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri dalam bidang pendidikan telah memiliki Beberapa Universitas dan Pesantren. Dengan melihat konsentrasi Pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini telah gencar meningkatkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini terlihat dari Kehadiran beberapa sekolah Negeri Menengah Kejuruan di beberapa daerah.

Untuk tingkat universitas, Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah memiliki universitas yang berdiri sejak lama yaitu Universitas Politani Mandalle, yang di susul oleh universitas Lokal Seperti Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Da'wah wal Irsyad (STAI DDI), Universitas Muhammadiyah (Unismuh). Dan beberapa univrsitas Kelas Jauh Seperti Universitas Terbuka yang memiliki Mahasiswa Ribuan, Universitas Veteran RI dan beberapa universitas lain.

Sedangkan Pesantren sendiri telah berdiri beberapa pesantren yang memiliki Santri dari berbagai daerah di Sulawesi dan Kalimantan seperti Pesantren IMIM Putri Minasatene, Pesantren Mujahidin, Pesantren DDI Baru- Baru Tangga. Dan masih ada beberapa lembaga pendidikan yang berasal dari Organisasi Islam Nasional dan

Lokal. Untuk Muhammadiyah dan DDI sendiri telah memiliki sekolah dari Jenjang Taman Kanak-kanan hingga Perguruan Tinggi.

Dengan kehadiran lembaga pendidikan tersebut maka kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

3. **Pariwisata**

Potensi Pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi Wisata Bahari yang terdiri dari obyek wisata taman laut Kapoposang dan Pulau Langkadea, Pulau Cengkeh, Pulau Pala dan beberapa pulau yang kosong. Disamping pantai pasir putih serta laut yang tenang, juga akan disuguhkan taman laut berupa terumbu karang berbagai jenis yang dilengkapi dengan ikan hias beraneka warna. Wisata bahari di Pulau Kapoposang kecamatan Liukang Tupabiring, selain menyuguhkan alam pantai yang natural, juga dilengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk menyelam (diving) dan snorkeling.

Taman rekreasi dan permandian alam Dufan Mattampa, Tombolo, Leang Surukang dan Amputtang, sebagai kawasan wisata, dilengkapi dengan dua kolam renang yang berskala nasional, taman permainan, gua bersejarah hingga Museum Karts yang memiliki koleksi buku-buku karts.

Taman Purbakala Sumpang Bitu yang berada di Kecamatan Balocci. Di kawasan ini, yang menjadi obyek utama adalah tangga seribu yang di puncaknya memiliki gua peninggalan bersejarah berupa tapak tangan dan kaki para nenek moyang. Dalam areal obyek wisata ini, merupakan perpaduan antara wisata agro yang memiliki tanaman berbagai macam serta taman yang indah, obyek wisata agro hutan bakau. Obyek wisata pra sejarah Leang Alle Masigi, Leang Lompoa, Leang Kajuara, Leang Camming Kana dan Gua Batang Lamara.

Sedangkan obyek wisata boga berupa makanan tradisional seperti dange, cucuru, dan makanan khas lainnya yang mudah didapat seperti di Kecamatan Segeri dan Mandalle. Wisata Budaya seperti Pa'Bissu, Tari Pamingki dan beberapa tarian tradisional lainnya. Untuk Pa'bissu, suatu budaya yang kini masih dipegang erat oleh sekelompok masyarakat Bissu untuk menghormati leluhur. Tarian ini, sangat menakjubkan karena dengan menggunakan sebilah keris dan menancapkannya di batang leher. Dengan tarian dan musik yang khas, tarian itu menjadi sajian yang mengandung nilai budaya yang kental. Pa'bissu ini juga banyak dipergunakan masyarakat petani pada awal mengolah lahannya. Obyek Wisata Bissu Dewatae. Bissu Dewatae digambarkan sebagai manusia setengah dewa dan dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual. Saat melakukan acara ritual, Bissu Dewatae berada dalam keadaan kerasukan dan saat

itu tubuh mereka menjadi kebal terhadap segala bentuk benda tajam. Kehebatan mereka dapat disaksikan saat mereka melakukan tarian Maggiri

BAB III

SUMBER DATA

A. Registrasi

Salah satu sumber data yang digunakan dalam menyusun profil kependudukan ini adalah melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan setiap hari selama tahun 2013 dengan menggunakan program/aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data yang bersumber dari registrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diproses dan diolah melalui sistem sehingga kemudian menghasilkan data statistik kependudukan, data tersebut dapat digunakan atau dipublikasikan secara resmi setelah dilakukan konsolidasi secara nasional guna mendapatkan data yang akurat, terkini dan faktual.

Registrasi data pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah Datang, dan pelayanan Pencatatan Sipil yang meliputi pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian non muslim, pengesahan dan pengakuan anak, sedangkan data registrasi pelayanan perkawinan yang beragama Islam diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep dan registrasi data perceraian penduduk yang beragama Islam diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. Non Registrasi

Profil kependudukan juga menggunakan data non registrasi yaitu data yang diperoleh dari data hasil olahan database kependudukan yang terdapat dalam SIAK dan juga data yang diperoleh dari hasil wawancara dan laporan lainnya. Data tersebut akan menjadi data pelengkap dalam mengolah data kependudukan secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan statistik kependudukan sesuai kebutuhan pengguna data.

C. Data Lintas Sektor

Selain data registrasi dan non registrasi yang digunakan dalam menyusun profil kependudukan ini, juga digunakan data pendukung dari instansi terkait seperti Bappeda Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pengadilan Agama dan instansi terkait lainnya.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah 12.362,29 km² yang terdiri dari daratan seluas 898,29 km² dan lautan 4 mil seluas 11.464 km² didiami penduduk sebanyak 357.344 jiwa, terdiri dari 174.575 jiwa laki-laki dan 182.769 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Dari tabel berikut terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Labakkang yaitu 53.274 jiwa (14,91%), sedangkan Kecamatan Tondong Tallasa memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10. 287 Jiwa (2,88%).

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	N	%	n	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Liukang Tangaya	9.056	5,19	9.451	5,17	18.507	5,18
Liukang Kalukuang Masalima	7.003	4,01	7.299	3,99	14.302	4,00
Liukang Tupabbiring	9.027	5,17	9.181	5,02	18.208	5,10
Pangkajene	24.411	13,98	25.436	13,92	49.847	13,95
Balocci	8.686	4,96	8.891	4,86	17.577	4,92
Bungoro	22.005	12,60	22.574	12,35	44.579	12,48
Labakkang	25.624	14,68	27.650	15,13	53.274	14,91
Ma'rang	17.853	10,23	18.794	10,28	36.647	10,26
Segeri	12.830	7,35	13.409	7,34	26.239	7,34
Minasate'ne	18.369	10,52	19.256	10,54	37.625	10,53
Mandalle	7.816	4,48	8.286	4,53	16.102	4,51

Tondong Tallasa	4.989	2,86	5.298	2,90	10.287	2,88
Liukang Tupabbiring Utara	6.906	3,96	7.244	3,96	14.150	3,96
TOTAL	174.575	100	182.769	100	357.344	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan yang ada

b. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong kabupaten yang padat, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan luas 1.112,29 km², Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didiami oleh 357.344 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 321 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didiami sebanyak 321 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

KECAMATAN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Liukang Tangaya	18.507	120,00	154
Liukang Kalukuang Masalima	14.302	91,50	156
Liukang Tupabbiring	18.208	70,16	260
Pangkajene	49.847	74,00	674
Balocci	17.577	47,39	371
Bungoro	44.579	76,48	583
Labakkang	53.274	143,48	371
Ma'rang	36.647	111,20	330
Segeri	26.239	90,12	291
Minasate'ne	37.625	98,46	382
Mandalle	16.102	75,22	214
Tondong Tallasa	10.287	78,28	131
Liukang Tupabbiring Utara	14.150	40,16	352
TOTAL	357.344	1.112,29	321

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Pangkajene merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 674 jiwa/km², sedangkan

wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Tondong Tallasa yaitu sebesar 131 jiwa/km².

Kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu mendapat perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan menjadi kabupaten yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan lahan yang lebih cenderung pada pembangunan fisik akan menyebabkan kota ini mengalami nasib yang sama dengan Kota Makassar.

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Angka Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kecamatan	Pddk Tahun 2012		Pddk Tahun 2013		Angka Pertambahan Penduduk
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Liukang Tangaya	18.209	5,16	18.507	5,18	0,08
Liukang Kalukuang Masalima	14.352	4,06	14.302	4,00	-0,01
Liukang Tupabbiring	18.235	5,16	18.208	5,10	-0,01
Pangkajene	48.655	13,78	49.847	13,95	0,34
Balocci	17.483	4,95	17.577	4,92	0,03
Bungoro	43.844	12,41	44.579	12,48	0,21
Labakkang	52.788	14,95	53.274	14,91	0,14
Ma'rang	36.626	10,37	36.647	10,26	0,01
Segeri	26.243	7,43	26.239	7,34	-0,00
Minasate'ne	36.372	10,30	37.625	10,53	0,35
Mandalle	15.944	4,51	16.102	4,51	0,04
Tondong Tallasa	10.189	2,88	10.287	2,88	0,03
Liukang Tupabbiring Utara	14.249	4,03	14.150	3,96	-0,03
Total	353.189	100,00	357.344	100,00	1,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Tabel 6 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih tergolong rendah. Selama kurun waktu 2012-2013, pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meningkat 4.155 jiwa atau 1,18 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan data hasil

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dan tersimpan dalam database kependudukan SIAK dalam kurung waktu Januari sampai Desember 2013. Pertumbuhan penduduk yang masih tergolong rendah, sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasinya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Minasate'ne yaitu 0,35 persen. Sedangkan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara mempunyai angka pertumbuhan yang minus yaitu -0,03 persen yang berarti kecamatan tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk. Penurunan jumlah penduduk yang terjadi di beberapa kecamatan disebabkan karena penghapusan data ganda, data yang tidak jelas orangnya dan data meninggal, meningkatnya mutasi penduduk (pindah keluar) serta kemungkinan ada kelahiran yang belum dilaporkan.

a. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan, kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain

Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15 - 64 tahun (67,91%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15 - 19 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 10 – 14 tahun, sedangkan penduduk perempuan berada pada kelompok umur 10 - 14 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 26,44 persen merupakan penduduk usia muda

(berusia dibawah 15 tahun) dan 5,65 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 7. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	11.310	6,479	10.580	5,789	21.890	6,126
5-9	17.854	10,227	17.018	9,311	34.872	9,759
10-14	19.277	11,042	18.427	10,082	37.704	10,551
15-19	16.815	9,632	16.229	8,880	33.044	9,247
20-24	15.981	9,154	16.351	8,946	32.332	9,048
25-29	15.472	8,863	15.856	8,675	31.328	8,767
30-34	14.671	8,404	15.313	8,378	29.984	8,391
35-39	13.231	7,579	14.135	7,734	27.366	7,658
40-44	13.190	7,556	13.948	7,631	27.138	7,594
45-49	10.062	5,764	11.623	6,359	21.685	6,068
50-54	7.877	4,512	9.188	5,027	17.065	4,776
55-59	5.885	3,371	6.687	3,659	12.572	3,518
60-64	4.624	2,649	5.550	3,037	10.174	2,847
65-69	3.363	1,926	4.511	2,468	7.874	2,203
70-74	2.488	1,425	3.465	1,896	5.953	1,666
>75	2.475	1,418	3.888	2,127	6.363	1,781
Total	174.575	100	182.769	100	357.344	100

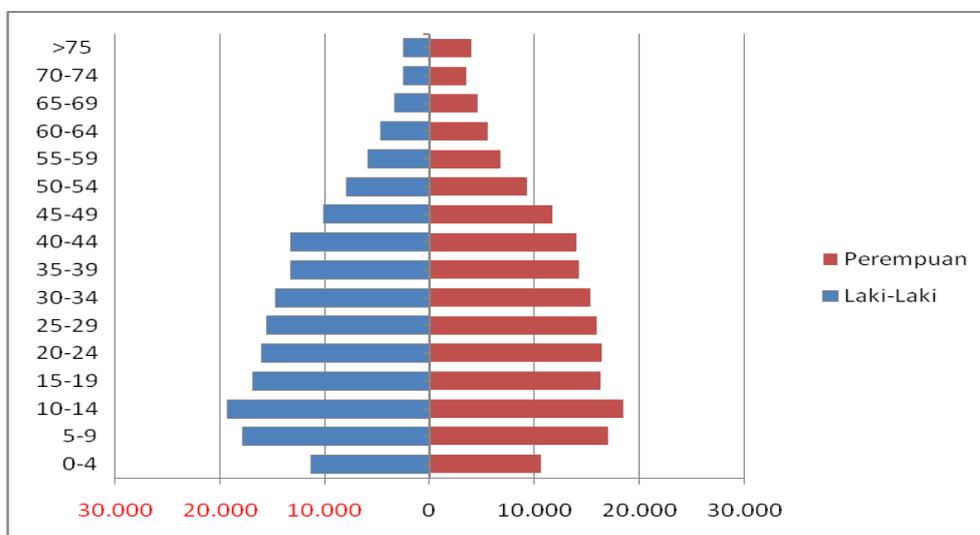
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (26,44%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai

serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 6,13% penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan



Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Piramida penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok 10-14 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga penduduk kelompok umur ini adalah kelompok yang lahir pada tahun 1999-2003 yang mulai memasuki usia tersebut ditambah dengan

migran yang masuk ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 5,65 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*. Dimana umur median penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 adalah 28,005 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 berusia di bawah 28 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikategorikan sebagai penduduk populasi sedang (*intermediate population*).

b. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 8. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	11.310	10.580	21.890	106,90
5-9	17.854	17.018	34.872	104,91
10-14	19.277	18.427	37.704	104,61
15-19	16.815	16.229	33.044	103,61
20-24	15.981	16.351	32.332	97,74
25-29	15.472	15.856	31.328	97,58
30-34	14.671	15.313	29.984	95,81
35-39	13.231	14.135	27.366	93,60
40-44	13.190	13.948	27.138	94,57

45-49	10.062	11.623	21.685	86,57
50-54	7.877	9.188	17.065	85,73
55-59	5.885	6.687	12.572	88,01
60-64	4.624	5.550	10.174	83,32
65-69	3.363	4.511	7.874	74,55
70-74	2.488	3.465	5.953	71,80
>75	2.475	3.888	6.363	63,66
Total	174.575	182.769	357.344	95,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Dari tabel 8 diatas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 95,52 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 orang penduduk laki-laki. Gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sama dengan gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok umur 20 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 106,90 yang artinya terdapat 107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur di atas 60 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

Tabel 9. Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		RJK
	N	%	n	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Liukang Tangaya	9.056	5,19	9.451	5,17	95,82
Liukang Kalukuang Masalima	7.003	4,01	7.299	3,99	95,94
Liukang Tupabbiring	9.027	5,17	9.181	5,02	98,32
Pangkajene	24.411	13,98	25.436	13,92	95,97
Balocci	8.686	4,98	8.891	4,86	97,69
Bungoro	22.005	12,60	22.574	12,35	97,48
Labakkang	25.624	14,68	27.650	15,13	92,67
Ma'rang	17.853	10,23	18.794	10,28	94,99

Segeri	12.830	7,35	13.409	7,34	95,68
Minasate'ne	18.369	10,52	19.256	10,54	95,39
Mandalle	7.816	4,48	8.286	4,53	94,33
Tondong Tallasa	4.989	2,86	5.298	2,90	94,17
Liukang Tupabbiring Utara	6.906	3,96	7.244	3,96	95,33
TOTAL	174.575	100	182.769	100	95,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, dari tabel 9 diatas terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) disetiap kecamatan di bawah 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki disetiap kecamatan lebih sedikit daripada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Liukang Tupabbiring memiliki Rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 98,32, sedangkan Rasio jenis kelamin terendah 92,67 terdapat di Kecamatan Labakkang.

c. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah *Dependency Ratio*, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel 10. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua, Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	∑ Pddk	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-14 Tahun (Umur Muda)	48.009	45.573	93.582	26,19
15-64 Tahun (Umur Produktif)	118.189	125.271	243.460	68,13
>65 Tahun (Umur Tua)	8.377	11.925	20.302	5,68
Jumlah	174.575	182.769	357.344	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Dari tabel 10 nampak bahwa 68,13 persen penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan penduduk Usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 26,19 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 5,68 persen.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif perempuan lebih besar daripada penduduk usia produktif laki-laki. Hal yang sama terlihat pada kelompok usia lanjut. Sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 11. Rasio Ketergantungan menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

KECAMATAN	Rasio Ketergantungan		
	RK Muda	RK Tua	RK Total
Liukang Tangaya	42,76	5,00	47,76
Liukang Kalukuang Masalima	43,07	4,43	47,50
Liukang Tupabbiring	38,25	5,54	43,79
Pangkajene	39,34	7,83	47,16
Balocci	40,55	10,18	50,73
Bungoro	38,97	7,62	46,59
Labakkang	37,21	8,67	45,88
Ma'rang	36,27	9,12	45,39
Segeri	35,61	11,26	46,87
Minasate'ne	39,69	8,66	48,36
Mandalle	36,63	11,80	48,43
Tondong Tallasa	35,64	10,77	46,41
Liukang Tupabbiring Utara	37,38	6,92	44,30
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	38,44	8,34	46,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Memperhatikan komposisi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia tua yang demikian, diketahui rasio ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 sebesar 46,78 per 100 penduduk usia kerja, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai tanggungan sekitar 46-47 penduduk usia non produktif, 38,44 diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 8,34 lainnya berasal

dari kelompok usia lanjut. Secara umum rasio ketergantungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berada dibawah rasio ketergantungan nasional. Kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama untuk memperbesar tabungan rumah tangga, investasi sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, juga menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

Apabila dilihat per kecamatan seperti pada tabel 11, maka rasio ketergantungan total tertinggi ada di Kecamatan Balocci sebesar 50,73 dan rasio ketergantungan total terendah di Kecamatan Liukang Tupabbiring sebesar 43,79. Sedangkan RK tua tertinggi ada di Kecamatan Mandalle yaitu sebesar 11,80 dan terendah di Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima sebesar 4,43. RK muda tertinggi ada di Kecamatan Liukang Kalukuang Masalima sebesar 43,07 dan terendah di Kecamatan Segeri sebesar 35,61.

Tabel 12. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	40,62	7,09	47,71
Perempuan	36,38	9,52	45,90
L+P	38,44	8,34	46,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Dari table 12 diatas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan total Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika dirinci menurut jenis kelamin, nampak bahwa angka beban tanggungan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal sama terlihat pada penduduk usia muda, namun pada penduduk lansia, angka beban ketergantungan laki-laki lebih kecil daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara alamiah, penduduk laki-laki diusia muda mempunyai beban ketergantungan lebih besar dibanding penduduk perempuan, namun pada usia lanjut terjadi sebaliknya yaitu penduduk perempuan mempunyai beban ketergantungan lebih besar dibanding laki-laki.

3. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

a. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan

ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 13. Distribusi Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	N	%	N	%
Tidak/Belum Sekolah	32.749	18,76	34.951	19,12	67.700	18,95
Belum Tamat SD/Sederajat	27.184	15,57	27.775	15,20	54.959	15,38
Tamat SD/Sederajat	60.203	34,49	69.331	37,93	129.534	36,25
SLTP/Sederajat	19.070	10,92	19.581	10,71	38.651	10,82
SLTA/Sederajat	28.449	16,30	22.308	12,21	50.757	14,20
Diploma I/II	708	0,41	1.356	0,74	2.064	0,58
Akademi/Diploma III/SARMUD	841	0,48	1.680	0,92	2.521	0,70
Diploma IV/Strata I	5.000	2,86	5.623	3,08	10.623	2,97
Strata II	346	0,20	159	0,09	505	0,14
Strata III	25	0,01	5	0,00	30	0,01
Jumlah	174.575	100	182.769	100	357.344	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan relatif masih rendah. Lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (36,25%) hanya tamat SD/Sederajat. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan

minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian.

Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan hampir sama dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada kelompok penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional* , akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki ketrampilan khusus.

b. Komposisi Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada umumnya memeluk agama Islam (99,49 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen dan Katholik (0,49 persen). Sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran kepercayaan masih sangat sedikit (0,02 persen).

Tabel 14. Persentase Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kecamatan	Agama												Jumlah
	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Buddha		Konghucu		
	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	
Lk. Tangaya	18.507	100											18.507
Lk. Kalmas	14.298	99,97	4	0,03									14.302
Lk. Tupabbiring	18.207	99,99	1	0,01									18.208
Pangkajene	49.535	99,37	216	0,43	48	0,10	6	0,01	42	0,08			49.847
Balocci	17.337	98,63	233	1,33	7	0,04							17.577
Bungoro	43.950	98,59	562	1,26	52	0,12	5	0,01	9	0,02	1	0,00	44.579
Labakkang	53.136	99,74	116	0,22	17	0,03	2	0,00	1	0,00	2	0,00	53.274
Ma'rang	36.603	99,88	35	0,10	9	0,02							36.647
Segeri	26.214	99,90	19	0,07	6	0,02							26.239
Minasate'ne	37.257	99,02	325	0,86	31	0,08	12	0,03					37.625
Mandalle	16.049	99,67	38	0,24	15	0,09							16.102
Tondong Tallasa	10.273	99,86	13	0,13	1	0,01							10.287

Lk. Tupabbiring Utara	14.149	99,99	1	0,00									14.150
Kabupaten Pangkep	355.515	99,49	1563	0,44	186	0,05	25	0,01	52	0,01	3	0,00	357.344

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan Liukang Labakkang merupakan wilayah dengan penduduk beragama Islam terbesar yaitu 53.136 jiwa, sedangkan Kecamatan Tondong Tallasa merupakan wilayah dengan penduduk beragama Islam terkecil yaitu 10.273 jiwa.

Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar disetiap kecamatan adalah agama Kristen. Kecamatan Bungoro merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar. Karena Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang didominasi Agama Islam, maka sedikit yang menganut agama Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan.

c. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 15. Distribusi Penduduk menurut status Kawin dan Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah
	N	%	n	%	n	%	N	%	
Liukang Tangaya	9.371	50,63	8.187	44,24	48	0,26	901	4,87	18.507
Liukang Kalukuang Masalima	7.368	51,52	6.155	43,04	62	0,43	717	5,01	14.302
Liukang Tupabbiring	9.678	53,15	7.578	41,62	108	0,59	844	4,64	18.208
Pangkajene	26.070	52,30	20.934	42,00	519	1,04	2.324	4,66	49.847
Balocci	8.663	49,29	7.740	44,03	232	1,32	942	5,36	17.577
Bungoro	21.573	48,39	20.204	45,32	546	1,22	2.256	5,06	44.579
Labakkang	26.310	49,39	23.281	43,70	701	1,32	2.982	5,60	53.274
Ma'rang	17.850	48,71	16.128	44,01	509	1,39	2.160	5,89	36.647
Segeri	13.221	50,39	11.059	42,15	379	1,44	1.580	6,02	26.239
Minasate'ne	19.169	50,95	16.207	43,08	362	0,96	1.887	5,02	37.625

Mandalle	7.893	49,02	6.974	43,31	218	1,35	1.017	6,32	16.102
Tondong Tallasa	4.521	43,95	5.029	48,89	114	1,11	623	6,06	10.287
Liukang Tupabbiring Utara	7.525	53,18	5.747	40,61	121	0,86	757	5,35	14.150
Kabupaten Pangkep	179.212	50,15	155.223	43,44	3919	1,10	18.990	5,31	357.344

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Tabel 15 tersebut diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 50,15 persen. Sedangkan proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

B. Kualitas Penduduk

Untuk mengukur kualitas penduduk di suatu daerah terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi dan sosial.

1. Kesehatan

1) Kelahiran (Fertilitas)

a) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (perempuan kelompok umur 15 – 49 tahun).

Informasi angka fertilitas total (TFR) di suatu daerah akan berguna bagi para pengambil keputusan dan perencana dalam merencanakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan terhadap ibu dan anak.

Angka Kelahiran Total (TFR) untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 sebesar 5,8, artinya bahwa pada setiap perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan melahirkan anak sebanyak 5 – 6 anak sampai akhir masa reproduksinya (15 – 49 tahun).

b) Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Menurut data SIAK terdapat 15.516 anak kelompok usia 0 – 4 tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013. Pada saat yang sama, banyaknya penduduk perempuan pada kelompok usia 15 – 49 tahun sebanyak 101.888 jiwa. Dengan demikian, maka rasio anak dan perempuan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 15,23. Angka sebesar 15,23 artinya bahwa pada tahun 2013 terdapat 15 – 16 anak di bawah 5 tahun (0 – 4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15 – 49 tahun.

2) Kematian (Mortalitas)

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah:

a) Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR/AKB*)

Angka Kelahiran Bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk jelasnya Angka Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Kelahiran Hidup		Kematian Bayi		AKB/IMR
		Σ	%	Σ	%	
1	Liukang Tangaya	337	5,68	-	-	-
2	Liukang Kalukuang Masalima	224	3,78	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	280	4,72	1	20	3,57
4	Pangkajene	806	13,58	-	-	-
5	Balocci	310	5,23	2	40	6,45
6	Bungoro	704	11,87	1	20	1,42
7	Labakkang	854	14,40	-	-	-
8	Ma'rang	654	11,02	1	20	1,53
9	Segeri	398	6,71	-	-	-
10	Minasate'ne	629	10,60	-	-	-
11	Mandalle	253	4,27	-	-	-
12	Tondong Tallasa	218	3,67	-	-	-
13	Liukang Tupabbiring Utara	265	4,47	-	-	-
Jumlah		5.932	100	5	100	0,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Dari tabel 16 diatas, terlihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 terdapat kematian bayi sebanyak 0 – 1 bayi. Kematian bayi terbanyak ada di Kecamatan Balocci yaitu 6 – 7 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

b) Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 dilaporkan bahwa dari 5.932 kelahiran hidup, terdapat 24 bayi yang meninggal pada umur di bawah 1 bulan (neonatal). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
		Σ	%	Σ	%	
1	Liukang Tangaya	337	5,68	2	8,33	5,93
2	Liukang Kalukuang Masalima	224	3,78	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	280	4,72	-	-	-
4	Pangkajene	806	13,58	7	29,17	8,68
5	Balocci	310	5,23	-	-	-
6	Bungoro	704	11,87	3	12,50	4,26
7	Labakkang	854	14,40	1	4,17	1,17
8	Ma'rang	654	11,02	2	8,33	3,06
9	Segeri	398	6,71	-	-	-
10	Minasate'ne	629	10,60	2	8,33	3,18
11	Mandalle	253	4,27	1	4,17	3,95
12	Tondong Tallasa	218	3,67	1	4,17	4,59
13	Liukang Tupabbiring Utara	265	4,47	5	20,83	18,87
Jumlah		5.932	100	24	100	4,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 terjadi 4 – 5 kematian bayi neonatal dari 1.000 kelahiran hidup.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Kematian Post Neo-Natal (Post Neo-Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka Kematian Post Neo-Natal untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Angka Kematian Post Neonatal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neonatal		AK Post Neonatal
		Σ	%	Σ	%	
1	Liukang Tangaya	337	5,68	-	-	-
2	Liukang Kalukuang Masalima	224	3,78	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	280	4,72	1	20	3,57
4	Pangkajene	806	13,58	-	-	-
5	Balocci	310	5,23	2	40	6,45
6	Bungoro	704	11,87	1	20	1,42
7	Labakkang	854	14,40	-	-	-
8	Ma'rang	654	11,02	1	20	1,53
9	Segeri	398	6,71	-	-	-
10	Minasate'ne	629	10,60	-	-	-
11	Mandalle	253	4,27	-	-	-
12	Tondong Tallasa	218	3,67	-	-	-
13	Liukang Tupabbiring Utara	265	4,47	-	-	-
Jumlah		5.932	100	5	100	0,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Dari tabel 18 diatas, giketahui bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 sebanyak 5.932 kelahiran hidup, dan dilaporkan bahwa terdapat 5 bayi yang meninggal pada umur 1 bulan sampai

dengan kurang dari 1 tahun. Maka Angka Kematian Post Neo-Natal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 0,84. Artinya bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 terjadi 0 - 1 kematian bayi Post Neo-Natal dari 1.000 kelahiran hidup.

d) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Angka Kematian Balita di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Penduduk Usia < 5 Tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Balita		AKABA
		Σ	%	Σ	%	
1	Liukang Tangaya	986	3,89	-	-	-
2	Liukang Kalukuang Masalima	904	3,57	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	1.114	4,40	4	66,67	3,59
4	Pangkajene	3.805	15,02	1	16,67	0,26
5	Balocci	1.260	4,97	-	-	-
6	Bungoro	3.463	13,67	1	16,67	0,29
7	Labakkang	3.941	15,56	-	-	-
8	Ma'rang	2.578	10,18	-	-	-
9	Segeri	1.639	6,47	-	-	-
10	Minasate'ne	3.030	11,96	-	-	-
11	Mandalle	1.071	4,23	-	-	-
12	Tondong Tallasa	716	2,83	-	-	-
13	Liukang Tupabbiring Utara	820	3,24	-	-	-
Jumlah		25.327	100	6	100	0,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Tabel 19 tersebut menunjukkan bahwa angka kematian balita adalah 0,24, yang artinya bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 1.000 balita terjadi 0 – 1 kematian balita pada tahun 2013.

e) Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Data kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan pengelolaannya dan data kelahiran bayi yang lahir hidup dapat diperoleh dari hasil pencatatan/pendataan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Diketahui bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 terjadi kelahiran sebanyak 5.932 kelahiran hidup. Namun tercatat bahwa pada tahun tersebut juga terdapat 8 orang ibu meninggal karena pra persalinan dan pasca persalinan, maka dari data tersebut dapat diperoleh angka kematian ibu (MMR) sebesar 1,35. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Σ Kelahiran Hidup	Σ Kematian Ibu				AKI
			Hamil	Bersalin	Nifas	Jml	
1	Liukang Tangaya	337	1	-	1	2	5,93
2	Liukang Kalukuang Masalima	224	-	-	-	-	-
3	Liukang Tupabbiring	280	-	-	-	-	-
4	Pangkajene	806	-	-	2	2	2,48
5	Balocci	310	-	-	-	-	-
6	Bungoro	704	-	-	-	-	-
7	Labakkang	854	-	-	2	2	2,34
8	Ma'rang	654	-	-	-	-	-
9	Segeri	398	-	-	-	-	-
10	Minasate'ne	629	-	-	1	1	1,59
11	Mandalle	253	-	-	-	-	-
12	Tondong Tallasa	218	-	-	-	-	-
13	Liukang Tupabbiring Utara	265	-	-	1	1	3,77
Jumlah		5.932	1	-	7	8	1,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013, dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 1 – 2 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin.

2. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

JENJANG PENDIDIKAN	SISWA		PENDUDUK		APK	
	L	P	L	P	L	P
SD	22.077	20.787	17.393	16.652	126,93%	124,83%
SLTP	8.790	9.134	11.453	10.824	76,75%	84,39%
SLTA	5.966	5.909	10.063	9.847	59,29%	60,01%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Tabel 21 diatas menunjukkan bahwa APK di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD sebesar 126,93 persen, hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang berasal dari luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengikuti jenjang pendidikan SD. Sementara APK terendah ada pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 59,29 persen, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan bukan hanya wajib belajar 9 tahun, tetapi juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 22. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

JENJANG PENDIDIKAN	SISWA		PENDUDUK		APM	
	L	P	L	P	L	P
SD	18.724	17.544	17.393	16.652	107,65%	105,36%
SLTP	6.190	6.495	11.453	10.824	54,05%	60,01%
SLTA	4.685	2.917	10.063	9.847	46,56%	29,62%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Sesuai tabel 22 diatas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun masih perlu ditingkatkan karena dari nilai APM terlihat untuk jenjang pendidikan SLTP sebesar 54,05 persen yang berarti dari 100 orang usia sekolah SLTP hanya terdapat 54 – 55 orang yang mengikuti jenjang

pendidikan SLTP . Selisih APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

3) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah siswa menyajikan persentase siswa yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. APS untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

JENJANG PENDIDIKAN	SISWA		PENDUDUK		APS	
	L	P	L	P	L	P
SD	85	62	22.077	20.787	0,39%	0,30%
SLTP	21	32	8.790	9.134	0,24%	0,35%
SLTA	4	11	5.966	5.909	0,07%	0,19%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Angka Putus Sekolah tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 0,39 persen yang berarti dari 1000 orang siswa SD terdapat 3 – 4 orang siswa yang putus sekolah.

3. Ekonomi

1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja) – Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja.

Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 – 64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Di samping itu juga untuk mengetahui jumlah tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Berikut ini gambaran distribusi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) :

Tabel 24. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	0 – 14	48.441	46.025	94.466
2	15 – 64	117.808	124.880	242.688
3	> 65	8.326	11.864	20.190
TOTAL		174.575	182.769	357.344

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Tabel 24 diatas, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 sebanyak 357.344 jiwa dan penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) terdapat 242.688 jiwa, maka persentase tenaga kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 67,91%, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jika semakin besar jumlah tenaga kerja maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Akan tetapi jika kondisi tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maupun bagi pihak swasta.

2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari usia 15 – 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun secara keseluruhan.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan data SIAK diketahui jumlah usia kerja atau usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 242.688 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 127.986 jiwa, maka APAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 sebesar 52,74%.

APAK untuk kelompok umur tertentu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 25. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Σ Bukan Angker	Σ Tenaga Kerja	APAK (%)
		Bekerja	Pencari Kerja	Σ Angker			
1	15 – 19	1.018	6.073	7.091	25.953	33.044	21,46
2	20 – 24	6.482	9.215	15.697	16.635	32.332	48,55
3	25 – 29	13.693	5.783	19.476	11.852	31.328	62,17
4	30 – 34	15.618	2.938	18.556	11.428	29.984	61,89
5	35 – 39	14.726	1.716	16.442	10.924	27.366	60,08
6	40 – 44	14.904	1.363	16.267	10.871	27.138	59,94
7	45 – 49	11.639	977	12.616	9.069	21.685	58,18
8	50 – 54	8.907	732	9.639	7.426	17.065	56,48
9	55 – 59	6.369	623	6.992	5.580	12.572	55,62
10	60 – 64	4.531	679	5.210	4.964	10.174	51,21
Jumlah		97.887	30.099	127.986	114.702	242.688	52,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh APAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 52,74% artinya bahwa 52,74% penduduk usia 15 – 64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Dari tabel di atas terlihat bahwa APAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk penduduk pada kelompok usia 15 – 19 tahun mempunyai nilai paling rendah yaitu 21,46% dan penduduk pada kelompok usia 25 – 29 tahun mempunyai nilai paling tinggi yaitu 62,17%.

3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Proporsi jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berusia produktif (15 – 64 tahun), yang diambil menurut 16 proporsi jenis pekerjaan terbanyak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Proporsi Jenis Pekerjaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Proporsi Jenis Pekerjaan
1	Wiraswasta	32.316	33,00%
2	Petani/Pekebun	23.531	24,04%
3	Nelayan/Perikanan	20.557	21,00%
4	Pegawai Negeri Sipil	7.938	8,11%
5	Karyawan Swasta	7.681	7,85%
6	Karyawan Honorar	2.716	2,77%
7	Buruh Harian Lepas	1.351	1,38%
8	Guru	1.121	1,15%
9	Karyawan BUMN	1.089	1,11%
10	Sopir	1.072	1,10%
11	Kepolisian RI	668	0,68%
12	Perdagangan	633	0,65%
13	Pedagang	584	0,60%
14	Transportasi	516	0,53%
15	Pelaut	412	0,42%
16	Tentara Nasional Indonesia	385	0,39%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Berdasarkan tabel 26 di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta

adalah terbanyak yaitu 32.316 orang atau 33,00 persen, sedangkan jenis pekerjaan Tentara Nasional Indonesia adalah yang terkecil yaitu hanya 385 orang atau 0,39 persen dari semua proporsi jenis pekerjaan yang dimiliki penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja); atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum pernah memulai bekerja.

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Begitupun sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Angka pengangguran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Σ Bukan Angker	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Bekerja	Pencari Kerja	Σ Angker		
1	15 – 19	1.018	6.073	7.091	25.953	85,64
2	20 – 24	6.482	9.215	15.697	16.635	58,71
3	25 – 29	13.693	5.783	19.476	11.852	29,69
4	30 – 34	15.618	2.938	18.556	11.428	15,83
5	35 – 39	14.726	1.716	16.442	10.924	10,44
6	40 – 44	14.904	1.363	16.267	10.871	8,38
7	45 – 49	11.639	977	12.616	9.069	7,74
8	50 – 54	8.907	732	9.639	7.426	7,59
9	55 – 59	6.369	623	6.992	5.580	8,91
10	60 – 64	4.531	679	5.210	4.964	13,03
Jumlah		97.887	30.099	127.986	114.702	23,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2013, diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 23,52%, artinya 23,52 persen penduduk berusia 15 – 64 tahun berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada kelompok usia 15 – 19 tahun yaitu sebanyak 6.073 jiwa dari 7.091 jiwa atau 85,64%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah terdapat pada kelompok usia 50 – 54 tahun sebesar 7,59% yaitu dari 9.639 jiwa angkatan kerja terdapat 732 jiwa pencari kerja.

4. Sosial

1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase Pekerja Anak (<15 tahun) berdasarkan data SIAK 2013 diperoleh jumlah anak usia 0 – 14 tahun yang bekerja adalah 33 jiwa. Sedangkan jumlah anak usia 0 – 14 tahun keseluruhannya ada 94.466 jiwa. Jadi persentase pekerja anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 0,03%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ternyata masih ada anak usia sekolah yang bekerja, dan ada kemungkinan juga anak tersebut tidak sekolah. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab anak usia tersebut bekerja diantaranya tidak adanya biaya untuk mengenyam pendidikan atau mereka bekerja untuk membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun angka tersebut terbilang kecil, akan tetapi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus tetap memperhatikan adanya Pekerja Anak usia 10 – 14 tahun. Karena pada usia tersebut, anak masih pada usia sekolah (SD atau SLTP) sebagaimana program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun, yaitu SD dan SLTP. Selain itu penting juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan berupa dana BOS yang tujuannya adalah meringankan beban orang tua untuk anak dalam menempuh pendidikan pada tingkat SD dan SLTP.

2) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Penduduk penyandang cacat merupakan penduduk yang memiliki kelainan fisik secara permanen, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang terjadi setelah lahir akibat dari gangguan penyakit atau musibah lainnya.

Data penduduk penyandang cacat yang terekam dalam database kependudukan SIAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih nihil karena pelaporan pendaftaran penduduk bagi penduduk yang tergolong penyandang cacat belum dilaporkan sesuai formulir biodata F.1-01 sehingga output data

penyangang cacat dalam database kependudukan belum kelihatan. Keengganan melaporkan data penduduk penyandang cacat disebabkan karena penduduk yang bersangkutan atau keluarganya masih terdapat perasaan malu atau dianggap tidak penting.

Dengan keadaan yang demikian maka data penduduk penyandang cacat belum dapat ditampilkan dalam profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013. Oleh karena Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran penduduk bagi penyandang cacat karena data tersebut dapat menjadi bahan penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan khususnya pemberdayaan penduduk penyandang cacat.

3) **Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin**

Demikian pula penduduk miskin penerima askeskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, belum dapat ditampilkan dalam profil perkembangan kependudukan tahun 2013, karena data tersebut belum diakomodir dalam database kependudukan SIAK dan diterima laporan penduduk miskin yang menerima askeskin dari instansi terkait. Namun diharapkan pada data tersebut dapat ditampilkan pada profil perkembangan kependudukan ditahun yang akan datang.

C. Mobilitas Penduduk

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan selama ini melayani proses pelaporan perpindahan penduduk, baik yang pindah datang dari daerah lain maupun pindah keluar dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan tujuan menetap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Migrasi keluar yang dimaksud adalah penduduk yang keluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan tujuan menetap di daerah lain. Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28. Jumlah Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013

No	Bulan	Pindah Datang	Pindah Keluar	Selisih
1	Januari	11	143	132
2	Februari	11	275	264
3	Maret	46	248	202
4	April	84	305	221
5	Mei	109	368	259
6	Juni	102	367	265
7	Juli	86	264	178
8	Agustus	44	309	265
9	September	23	336	313
10	Oktober	48	350	302
11	November	81	374	293
12	Desember	117	409	292
Jumlah		762	3.748	2.986

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah

Tabel 28 diatas menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 yaitu jumlah penduduk yang migrasi masuk (pindah datang) sebanyak 762 jiwa dan jumlah penduduk yang migrasi keluar (pindah keluar) sebanyak 3.748 jiwa. Angka Migrasi Neto diperoleh sebesar 8,36, yang

berarti bahwa setiap 1.000 penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 8 – 9 jiwa migran keluar.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah dan diberikan kepada penduduk yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam Database Kependudukan. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia karena merupakan dokumen yang menjadi dasar bagi lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Dalam Kartu Keluarga memuat susunan anggota keluarga yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari adanya kepala keluarga yang ganda, maka

perempuan dapat menjadi kepala keluarga karena status perkawinan, baik itu karena cerai mati maupun cerai hidup sehingga menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang, hanya menjadi kepala keluarga di salah satu istrinya sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya..

Untuk mengetahui tingkat kepemilikan Kartu Keluarga bagi keluarga yang terdaftar dalam Database Kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Keluarga Yang Memiliki		Keluarga Yang Belum Memiliki	
			KK	%	KK	%
1	Liukang Tangaya	4.911	2.575	52,43	2.336	47,57
2	Liukang Kalmas	3.806	2.858	75,09	948	24,91
3	Liukang Tupabbiring	4.704	2.566	54,55	2.138	45,45
4	Pangkajene	13.300	9.498	71,41	3.802	28,59
5	Balocci	4.919	3.532	71,80	1.387	28,2
6	Bungoro	12.559	7.666	61,04	4.893	38,96
7	Labakkang	15.228	8.982	58,98	6.246	41,02
8	Ma'rang	10.387	5.986	57,63	4.401	42,37
9	Segeri	7.076	4.969	70,22	2.107	29,78
10	Minasate'ne	10.025	8.014	79,94	2.011	20,06
11	Mandalle	4.510	2.712	60,13	1.798	39,87
12	Tondong Tallasa	3.048	1.814	59,51	1.234	40,49
13	Liukang Tupabbiring Utara	3.765	1.717	45,60	2.048	54,4
	Pangkajene dan Kepulauan	98.238	62.889	64,12	35.349	35,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Tabel 29 menunjukkan bahwa dari 98.238 Keluarga yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdapat 62.889 Keluarga (64,12%) yang sudah memiliki

Kartu Keluarga (KK), sedangkan Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) masih ada 35.349 Keluarga (35,88%). Rendahnya kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan karena pada umumnya masyarakat baru mengurus Kartu Keluarga, pada saat dibutuhkan untuk persyaratan di pelayanan publik, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki keperluan atau tidak pernah berurusan dengan pelayanan publik menganggap bahwa Kartu Keluarga tidak penting untuk dimiliki. Dengan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan Kartu Keluarga bukan semata-mata dilihat dari Kartu Keluarga sebagai dokumen Negara yang wajib dimiliki oleh keluarga, tetapi hanya dilihat sebagai kebutuhan persyaratan belaka yang diperlukan dalam setiap layanan publik.

Untuk merubah perilaku dan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan Kartu Keluarga maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, setiap tahunnya telah memprogramkan kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk didalamnya mengenai pentingnya kepemilikan dokumen Kartu Keluarga bagi setiap penduduk/keluarga serta mengoptimalkan pelayanan keliling guna mendekatkan tempat pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan Kartu Keluarga.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan akan menjadi dasar pelayanan dalam setiap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah dan Swasta.

Setiap penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik, dan dalam KTP Elektronik tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses sebagai Penduduk Indonesia. Penerapan KTP Elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat akurasi data penduduk serta mendukung terbangunnya database kependudukan baik di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Dengan KTP Elektronik maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP Elektronik lebih dari satu dan/atau dipalsukan

KTP Elektroniknya mengingat dalam KTP Elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik yang dapat menjamin ketunggalan data seseorang.

Berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pemberlakuan KTP Elektronik berlaku seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk, kecuali kalau terjadi perubahan elemen data dalam KTP Elektronik seperti perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, perubahan pekerjaan dan pendidikan, penambahan gelar dan perubahan jenis kelamin serta berubahnya domisili, barulah dilakukan perubahan atau penggantian KTP Elektronik. Untuk jelasnya kepemilikan KTP Elektronik bagi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan		Yang Belum Memiliki	
			KTP	%	KTP	%
1	Liukang Tangaya	12.412	8.224	66,26	4.188	33,74
2	Liukang Kalmas	9.474	7.132	75,28	2.342	24,72
3	Liukang Tupabbiring	12.768	8.272	64,79	4.496	35,21
4	Pangkajene	35.734	27.190	76,09	8.544	23,91
5	Balocci	12.367	10.223	82,66	2.144	17,34
6	Bungoro	31.858	25.403	79,74	6.455	20,26
7	Labakkang	38.581	29.336	76,04	9.245	23,96
8	Ma'rang	26.965	19.602	72,69	7.363	27,31
9	Segeri	19.716	12.030	61,02	7.686	38,98
10	Minasate'ne	26.916	21.290	79,10	5.626	20,9
11	Mandalle	11.960	7.844	65,59	4.116	34,41
12	Tondong Tallasa	7.481	5.891	78,75	1.590	21,25
13	Liukang Tupabbiring Utara	10.070	7.080	70,31	2.990	29,69
	Pangkajene dan Kepulauan	256.302	189.994	74,13	66.308	25,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Tabel 30 menunjukkan bahwa dari 256.302 wajib KTP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terdapat 189.994 (74,13%) wajib KTP yang telah memiliki KTP, sedangkan penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP masih terdapat 66.308 (25,87%). KTP yang diterbitkan dan telah diberikan kepada penduduk wajib KTP adalah KTP Elektronik bagi penduduk yang telah direkam sidik jari, iris mata, tanda tangan dan pas photo, sedangkan KTP Non Elektronik (KTP biasa/konvensional) hanya diberikan kepada penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik tetapi KTP Elektroniknya belum terbit atau rusak atau terdapat elemen data yang salah dan/atau hilang.

Apabila kepemilikan KTP dilihat dari setiap kecamatan maka Kecamatan Balocci menempati persentase tertinggi wajib KTP yang telah memiliki KTP yaitu mencapai 82,66 % dan yang belum memiliki KTP terdapat 17,34 % sedangkan Kecamatan Segeri merupakan kecamatan yang terendah persentase kepemilikan KTP yaitu baru mencapai 61,02 % dan yang belum memiliki KTP masih terdapat 38,98 % wajib KTP.

Rendahnya persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan beberapa hal diantaranya; penduduk wajib KTP umumnya masih berada di daerah lain sehingga belum melakukan perekaman KTP Elektronik, terdapat data ganda, penduduk lansia yang tidak memerlukan lagi KTP, penduduk yang tidak membutuhkan KTP karena tidak pernah berhubungan dengan layanan publik di Instansi Pemerintah dan Swasta serta masih adanya penduduk yang belum menyadari pentingnya kepemilikan KTP atau penduduk baru mengajukan permohonan KTP apabila sudah diperlukan di layanan publik.

Agar semua wajib KTP memiliki KTP, maka upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pelayanan KTP khususnya KTP Elektronik adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan KTP dan mengoptimalkan pelayanan keliling guna mendekatkan tempat pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan KTP.

C. Kepemilikan Akta Catatan Sipil

Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap dari peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi non muslim, pengakuan anak dan pengesahan anak.. Akta Catatan Sipil merupakan pengakuan negara atas status keperdataan/sipil seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan publik lainnya.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran meliputi register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan yang memuat hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya sah menurut Agama dan belum sah menurut negara, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kecuali bila anak tersebut telah mendapat akta pengakuan anak dari ayahnya setelah disetujui oleh ibu kandungnya atau pengesahan anak. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena merupakan dokumen awal yang menjadi dasar dalam layanan publik atau dasar penerbitan dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan		Yang Belum Memiliki	
			Akta Kelahiran	%	Akta Kelahiran	%
1	Liukang Tangaya	18.507	2.311	18,16	16.196	81,84
2	Liukang Kalmas	14.302	2.168	15,16	12.134	84,84
3	Liukang Tupabbiring	18.208	2.973	16,33	15.235	83,67
4	Pangkajene	49.847	23.916	47,98	25.931	52,02
5	Balocci	17.577	8.646	49,19	8.931	50,81
6	Bungoro	44.579	20.966	47,03	23.613	52,97
7	Labakkang	53.274	25.187	47,28	28.087	52,72
8	Ma'rang	36.647	17.570	47,94	19.077	52,06
9	Segeri	26.239	11.083	42,24	15.156	57,76
10	Minasate'ne	37.625	18.763	49,87	18.862	50,13
11	Mandalle	16.102	7.636	47,42	8.466	52,58
12	Tondong Tallasa	10.287	4.649	45,19	5.638	54,81
13	Liukang Tupabbiring Utara	14.150	2.569	18,16	11.581	81,84
	Pangkajene dan Kepulauan	357.344	148.437	41,54	208.907	58,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013, diolah.

Tabel 31 menggambarkan bahwa dari 357.344 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah terdapat 148.437 orang (41,54%) yang telah memiliki Akta Kelahiran baik hasil pelayanan secara manual maupun pelayanan melalui database SIAK yang berbasis NIK secara nasional, sedangkan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran masih terdapat 208.907 (58,46 %).

Apabila kepemilikan Akta Kelahiran dilihat dari setiap kecamatan maka Kecamatan Minasate'ne (49,87%) dan Kecamatan Balocci (49,16%) menempati persentase tertinggi penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran, itu artinya bahwa penduduk Kecamatan Minasate'ne dan Kecamatan Balocci memiliki kepedulian atau kesadaran dalam kepemilikan Akta Kelahiran yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan Kecamatan yang persentase terendah dalam kepemilikan Akta Kelahiran adalah Kecamatan yang berada di wilayah kepulauan yaitu secara berturut Kecamatan Liukang Kalmas (15,16%), Kecamatan Liukang Tupabbiring (16,33%), Kecamatan Liukang Tangaya (18,16%), dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (18,16%). Rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran di 4 (empat) Kecamatan Kepulauan, disebabkan karena kondisi geografis yang jauh dan sulit dijangkau serta kebutuhan akan Akta Kelahiran belum menjadi kebutuhan yang mendasar yang harus dimiliki, disamping itu masyarakat kepulauan jarang mendapatkan layanan publik yang memerlukan dokumen Akta Kelahiran, kecuali hanya bagi anak sekolah yang memerlukan Akta Kelahiran karena menjadi dasar dalam penulisan ijazah.

Agar masyarakat kepulauan khususnya anak yang baru lahir atau usia sekolah mendapatkan layanan dokumen Akta Kelahiran, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah memprogramkan pelayanan secara mobile yaitu dengan mengunjungi pulau-pulau untuk memberikan pelayanan Akta Kelahiran secara gratis, serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen Akta Kelahiran disemua kecamatan.

2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan dokumen yang diberikan kepada penduduk yang telah melakukan perkawinan sah menurut agama dan telah sah menurut hukum negara. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) tempat yaitu: *pertama*; bagi penduduk yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, *kedua*; bagi penduduk yang beragama Non Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk

keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Untuk jelasnya kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang berstatus kawin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 32. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Bersatus Kawin		Kepemilikan Akta Perkawinan			
		Islam	Non Islam	Islam		Non Islam	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Liukang Tangaya	8.187	0	5.142	62,81	0	0
2	Liukang Kalmas	6.153	2	3.916	63,64	0	0
3	Liukang Tupabbiring	7.578	0	4.567	60,27	0	0
4	Pangkajene	20.794	140	13.448	64,67	113	80,71
5	Balocci	7.652	88	4.741	61,96	69	78,41
6	Bungoro	19.934	270	12.576	63,08	195	72,22
7	Labakkang	23.233	48	14.569	62,71	32	66,67
8	Ma'rang	16.108	20	9.863	61,23	13	65
9	Segeri	11.050	9	6.914	62,57	5	55,56
10	Minasate'ne	16.059	148	10.131	63,09	120	81,08
11	Mandalle	6.951	23	3.942	56,71	18	78,26
12	Tondong Tallasa	5.025	4	3.151	62,71	3	75
13	Liukang Tupabbiring Utara	5.747	0	3.415	59,42	0	0
	Pangkajene dan Kepulauan	154.471	752	96.375	62,39	568	75,53

Sumber: Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Tabel 32 menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beragama Islam dan telah berstatus kawin sebanyak 154.471 jiwa, terdapat 62,39 % yang telah memiliki Akta Perkawinan dan selebihnya 37,61 % belum memiliki akta perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam yang belum memiliki akta perkawinan, kemungkinan perkawinannya sudah dilakukan atau sah menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau bisa jadi perkawinannya terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan penduduk Non Islam yang berstatus kawin sebanyak 752 jiwa dan terdapat 75,53 % yang telah memiliki Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selebihnya masih ada 24,47 % yang belum memiliki Akta Perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Non Islam yang telah melakukan perkawinan menurut agamanya, umumnya memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk disahkan perkawinannya secara hukum negara.

3. Akta Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan perkawinan sah pasangan suami isteri yang keputusan perceraianya melalui putusan Pengadilan Agama bagi penduduk yang beragama Islam dan putusan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang beragama Non Islam.

Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah perceraian bagi penduduk yang beragama Non Islam yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam tetap dilakukan di Pengadilan Agama, namun hasilnya diharapkan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna status perkawinan yang bersangkutan akan disesuaikan dalam database kependudukan SIAK. Akta perceraian wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup karena menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pernikahan berikutnya, pembagian harta kekayaan, dan warisan.

Untuk mengetahui kepemilikan akta perceraian bagi penduduk yang telah berstatus cerai hidup, baik penduduk yang beragama Islam maupun non Islam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 33. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2013.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berstatus Cerai Hidup		Kepemilikan Akta Perceraian			
				Islam		Non Islam	
		Islam	Non Islam	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Liukang Tangaya	48	0	14	29,17	0	0
2	Liukang Kalmas	62	0	21	33,87	0	0
3	Liukang Tupabbiring	108	0	42	38,89	0	0
4	Pangkajene	516	3	269	52,13	2	66,68
5	Balocci	230	2	108	46,96	1	50
6	Bungoro	545	1	273	50,09	1	100
7	Labakkang	701	1	321	45,79	1	100
8	Ma'rang	509	0	237	46,56	0	0
9	Segeri	379	0	125	32,98	0	0
10	Minasate'ne	360	2	202	56,11	2	100
11	Mandalle	218	0	65	29,82	0	0

12	Tondong Tallasa	114	0	38	33,33	0	0
13	Liukang Tupabbiring Utara	121	0	31	25,62	0	0
	Pangkajene dan Kepulauan	3.910	9	1.746	44,65	7	77,78

Sumber: Kantor Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangajene dan Kepulauan, Tahun 2013, diolah.

Tabel 33 menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beragama Islam dan berstatus cerai hidup sebanyak 3.910 jiwa, terdapat 44,65 % yang telah memiliki Akta Perceraian dan selebihnya 55,35 % belum memiliki Akta Perceraian. Rendahnya kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam yang sudah berstatus cerai hidup dalam database kependudukan disebabkan karena kemungkinan perceraianya masih bersifat pisah ranjang yang sudah berlangsung lama namun tidak dilaporkan kepada Pengadilan Agama untuk diproses perceraianya secara hukum negara, atau mungkin sementara dalam proses hukum atau bisa jadi karena menganggap bahwa perceraian secara hukum melalui Pengadilan Agama tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya.

Sedangkan penduduk Non Islam yang berstatus cerai hidup sebanyak 9 orang dan terdapat 77,78 % yang telah memiliki Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selebihnya masih ada 22,22 % yang belum memiliki Akta Perceraian, hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Non Islam yang berstatus cerai hidup cenderung memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

4. Akta Kematian

Ketentuan Pencatatan Akta Kematian sudah diatur sejak dahulu sampai sekarang, baik melalui Staatsblad 1927:564 dan Staatsblad 1939:288, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun pencatatan dan penerbitan akta kematian belum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian masih kurang dan akta kematian belum menjadi keperluan atau persyaratan dalam pelayanan publik.

Salah satu kegunaan Akta Kematian adalah untuk pengurusan dana Pensiun/Taspen, Asuransi atau uang duka bagi ahli warisnya, dan untuk pengurusan warisan bagi suami/istri/anaknya. Pelayanan Akta Kematian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai tahun 2013 baru mencapai 37 orang.

Sementara persentase kepemilikan Akta Kematian belum bisa diketahui karena kurangnya kesadaran penduduk atau keluarga atau petugas setempat untuk melaporkan setiap kematian yang terjadi di wilayahnya.

5. Akta Pengakuan Anak

Pencatatan Pengakuan Anak merupakan salah satu dokumen pencatatan sipil yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses pencatatan pengakuan anak dapat dilakukan sejak tanggal surat pengakuan anak yang dibuat oleh ayah biologis ibunya dan turut disetujui oleh ibu kandung dari anak tersebut. Demikian pula bahwa Akta Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Dengan demikian Akta Pengakuan Anak dapat diberikan kepada anak yang lahir dari suami dan isteri yang melakukan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (belum tercatat/memiliki akta pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan akta perkawinan dari Pejabat Pencatatan Sipil bagi yang beragama Non Islam. Bagi Anak yang telah mendapatkan Akta Pengakuan Anak, maka dalam Akta Kelahirannya sudah dapat mencantumkan nama ayah.

Kepemilikan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak adanya ketentuan pencatatan pengakuan anak baik pada saat pemberlakuan Peraturan Pencatatan Sipil melalui Staatsblad 1927:564 dan Staatsblad 1939:288, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belum ada yang mengajukan permohonan pencatatan akta pengakuan anak, hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami mengenai pentingnya pencatatan pengakuan anak bagi anak yang lahir melalui perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Mengingat pencatatan akta pengakuan anak sangat penting dimata hukum karena menunjukkan status hukum keperdataan seseorang yang mengalaminya, maka ketentuan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya anak yang lahir sesuai ketentuan tersebut tetapi dalam akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah.

6. Akta Pengesahan Anak

Pencatatan Pengesahan Anak merupakan salah satu dokumen pencatatan sipil yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Anak yang lahir diluar perkawinan sah menurut

hukum agama dan hukum negara dapat dilakukan pengesahan anak sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dan telah mendapatkan akta perkawinan. Bagi Anak yang telah mendapatkan Akta Pengesahan Anak maka dalam Akta Kelahirannya sudah dapat mencantumkan nama ayah.

Kepemilikan Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama ini belum ada yang dicatatkan/diterbitkan karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengingat pencatatan akta pengesahan anak sangat penting dimata hukum karena menunjukkan status hukum keperdataan seseorang yang mengalaminya, maka ketentuan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya anak yang lahir sesuai ketentuan tersebut tetapi dalam akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah.

D. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar

Pendaftaran penduduk orang terlantar merupakan bagian dari pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan. Surat Keterangan Orang Terlantar merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diberikan kepada penduduk termasuk dalam kategori orang terlantar.

Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini belum ada yang diterbitkan karena penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum ada yang teridentifikasi dan tergolong orang terlantar atau masuk kategori rentan administrasi kependudukan.

BAB VI

KESIMPULAN

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, yang bertujuan memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta untuk berbagai keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta bahan pengambilan kebijakan lainnya.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dikenal sebagai daerah tiga dimensi karena memiliki wilayah dataran tinggi (pegunungan), dataran rendah dan kepulauan. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bersumber dari database kependudukan SIAK hasil konsolidasi bulan Desember (semester II) tahun 2013 sebanyak 357.344 jiwa yang terdiri dari 174.575 laki-laki dan 182.769 perempuan, dengan demikian rasio

jenis kelamin 95,51 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan atau dengan kata lain bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 orang penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah Keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 98.238 Kepala Keluarga, dengan demikian anggota keluarga rata-rata 3-4 orang dalam setiap keluarga. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2012 yang sebanyak 353.189 jiwa, maka jumlah penduduk tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 4.155 jiwa (1,18%). Sedangkan bila dilihat dari kepadatan penduduk, maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki luas wilayah Dengan luas 1.112,29 km², dengan jumlah penduduk 357.344 jiwa, memiliki kepadatan sebesar 321 jiwa/km².

Apabila dilihat dari karakteristik demografi menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun merupakan jumlah yang paling besar (26,44 %), sedangkan rasio jenis kelamin (sex rasio) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 95,52 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 orang penduduk laki-laki. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 sebesar 46,78 per 100 penduduk usia kerja yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sekitar 46-47 penduduk usia non produktif.

Pada sisi lain, komposisi penduduk menurut karakteristik sosial menunjukkan bahwa penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah yang terbanyak yaitu 129.534 orang (36,25 %) dari keseluruhan jumlah penduduk tahun 2013, dan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 355.515 orang (99,49 %), sedangkan distribusi penduduk menurut status perkawinan maka penduduk yang belum kawin masih lebih banyak dibanding yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati yaitu mencapai 179.212 orang (50,15 %).

Kualitas penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013, jika dilihat dari bidang kesehatan menunjukkan bahwa angka kelahiran total (AKT) sebesar 5,8 yang artinya bahwa setiap perempuan akan melahirkan anak sebanyak 5-6 anak sampai akhir masa reproduksinya (15-49 tahun), sedangkan dari 1.000 kelahiran hidup terdapat kematian bayi sebanyak 0-1 bayi. Untuk angka kematian ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 1-2 kematian ibu saat hamil, bersalin maupun pasca bersalin.

Bidang pendidikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013, menunjukkan bahwa untuk Angka Partisipasi Kasar yang tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD sebesar 126,93 persen, Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 107,65 persen dan Angka Putus Sekolah tertinggi juga terdapat pada jenjang pendidikan SD yaitu 0,39 persen yang berarti dari 1.000 siswa SD terdapat 3-4 orang siswa yang putus sekolah.

Bidang Ekonomi, Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling tinggi terdapat pada kelompok umur 25-29, yang mana mayoritas bekerja pada jenis pekerjaan wiraswasta. Sedangkan angka pengangguran tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan terendah pada kelompok umur 50-54 tahun.

Sedangkan bidang sosial, persentase pekerja anak yang berusia dibawah 15 tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2013 adalah 33 jiwa atau 0,03 persen dari jumlah anak usia 0-14 tahun sebanyak 94.466 jiwa. Sedangkan jumlah penyandang cacat dan penduduk miskin yang telah mempunyai kartu jaminan kesehatan belum teridentifikasi karena data dari instansi terkait belum valid dan data SIAK belum dapat menampilkan data tersebut.

Mobilitas penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2013 yaitu jumlah penduduk yang migrasi masuk (pindah datang) sebanyak 762 jiwa dan jumlah penduduk yang migrasi keluar (pindah keluar) sebanyak 3.748 jiwa. Angka Migrasi Neto diperoleh sebesar 8,36, yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 8 – 9 jiwa migran keluar.

Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Surat Keterangan Orang Terlantar masih bervariasi persentasenya bahkan ada dokumen kependudukan yang kepemilikannya tergolong rendah. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut disebabkan antara lain; dokumen kependudukan dianggap belum menjadi kebutuhan dasar atau belum dilihat sebagai dokumen negara yang wajib dimiliki setiap penduduk, kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah, prosedur atau mekanisme pengurusan dianggap masih berbelit-belit dan kebiasaan pengurusan dilakukan pada saat diperlukan di layanan publik. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dapat diketahui; untuk Kartu Keluarga baru mencapai 64,12 %, Kartu Tanda Penduduk 74,13 %, Akta Kelahiran 41,54 %, Akta Perkawinan bagi yang beragama Islam 62,39 % dan Non Islam 75 %, Akta Perceraian bagi yang beragama Islam 44,65 % dan Non Islam 77,78 %, Akta Kematian yang sudah diterbitkan baru mencapai 37 orang, sedangkan Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak serta Surat Keterangan Orang Terlantar samasekali belum ada yang diterbitkan karena masih dianggap hal baru dalam pengaturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan khususnya dalam rangka penyiapan data kependudukan yang akurat, faktual dan terkini serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu sinerjik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran untuk program kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Ekonomi Makro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2013, Pangkajene.

Tim Bimtek Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan, 2014, Makassar.